



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP )

SEKRETARIAT DAERAH

# 2025



# KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat disusun dengan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman. Selain itu, laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini sangat diharapkan yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa akan datang. Akhir kata semoga LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Parit Malintang, 05 Februari 2025



**SEKRETARIS DAERAH**

**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM,C.R.B.C**  
**Pembina Utama Madya NIP. 19790402 199803 1 003**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
Bab I Pendahuluan .....	
A.Gambaran Umum Sekretariat Daerah .....	1
B.Permasalahan Utama ( <i>Starategic Issued</i> ) .....	6
C.Masalah Masing-Masing Bagian .....	7
D.Sistematika Pelaporan .....	12
Bab II Perencanaan Kinerja .....	
A.Rencana Startegis .....	14
B.Cascading.....	16
C.Tujuan dan Sasaran Strategis .....	17
D.Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	18
E.Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	
A.Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Periode 2021-2026 .....	22
B.Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 .....	81
Bab IV Penutup .....	
A.Kesimpulan.....	88



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 1.2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis .....	18
Tabel 2.2	IKU Sekretariat Daerah .....	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah .....	20
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah 2024.....	23
Tabel 3.2	Perbandingan Target Dan Capaian Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 .....	25
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Capaian LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2024.....	29
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	29
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.....	35
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024 .....	36
Tabel 3.8	Capaian Persentase Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2024 .....	40
Tabel 3.9	Capaian Persentase bahan kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah Tahun 2024 .....	44
Tabel 3.10	Capaian Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa yand ditindaklanjuti.....	47
Tabel 3.11	Capaian Persentase UKPP Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik Tahun 2024 .....	72
Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Capaian SKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	73
Tabel 3.13	Capaian Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti Tahun 2024.....	77
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Capaian LHE Sakip Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	78
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman .....	81



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah**

Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai sebuah OPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah Mempunyai Fungsi:

1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif pada instansi daerah;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan/ atau
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan Sekretaris Daerah membawahi.

1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (Tiga) bagian terdiri dari:

a. Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama

Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, serta fasilitasi kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama

Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemerintahan dan Kerjasama
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi administrasi kewilayahan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi otonomi daerah.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina mental spiritual
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesejahteraan sosial
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesejahteraan masyarakat

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Bagian

Hukum terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perundang – undangan
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bantuan hukum
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi dokumentasi dan informasi

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 bagian terdiri dari:

a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembina BUMD dan BLUD
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengendalian distribusi perekonomian dan sumber daya alam
3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan pengawasan ekonomi Mikro kecil

b. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi penyusunan program
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengendalian program dan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan



### c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

1. Subbagian pengelolaan pengadaan secara elektronik
2. Subbagian pembina dan advokasi pengadaan barang dan jasa dan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan pengadaan barang dan jasa

### 3. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 bagian terdiri dari:

#### a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Umum terdiri dari:

1. Subbagian tata usaha pimpinan Staf ahli dan kepegawaian
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perlengkapan dan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi rumah tangga

#### b. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Organisasi terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kelembagaan dan analisis jabatan
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pelayanan public dan tata laksana
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kinerja dan reformasi birokrasi

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

1. Subbagian protocol
2. Subbagian komunikasi dan dokumen pimpinan

d. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan evaluasi dan pelaporan
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keungan
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik

Mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik.

## 5. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

## 6. Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati dibidang social, budaya dan SDM

**Tabel 1.1**

**Daftar Jumlah Pegawai  
Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	6
3	III	41
4	IV	18
	Jumlah	65

Sumber :DUK Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2024

**Tabel 1.2**

**Daftar Jumlah Pegawai  
Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pascasarjana (S.II)	22
2	Sarjana (S.I)	33
3	Diploma	0
4	SMA/SMK	10
5	SMP	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>65</b>

Sumber :DUK Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2023

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Isu – Isu penting yang masih dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja adalah :

- (1) Masih Belum Optimalnya kompetensi sumber daya perencanaan.
- (2) Pengelolaan kegiatan maupun anggaran masih belum optimal dan sepenuhnya juga



belum mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi.

- (3) Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.
- (4) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Sekretariat.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Sekretariat masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemerhati pembangunan daerah, di antaranya adalah :

- a) Pemanfaatan kapasitas SDM yang ada dengan memaksimalkan fungsi manajerial pimpinan dan penerapan standar operasional prosedur kerja yang efektif dan efisien.
- b) Senantiasa mereview pelaksanaan perencanaan pembangunan dan meningkatkan akurasi data serta memperhatikan masukan dari seluruh pemerhati pembangunan daerah.
- c) Memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan data secara sistematis, akurat dan cepat dalam suatu sistem informasi.

### **C. MASALAH MASING-MASING BAGIAN**

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - a. Penyaluran hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial masyarakat terkendala pada lambatnya pengurus masjid/mushalla/

majelis taklim melengkapi persyaratan penyaluran hibah

- b. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial penerima hibah belum memberikan laporan realisasi hibah yang diterima, walau sudah diberikan surat permintaan pembuatan laporan realisasi hibah.
- c. Perlu peningkatan penambahan anggaran pada kegiatan Gemainsani agar lebih banyak hafiz/hafizah penerima reward/hadiah/beasiswa Gemainsani ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman
- d. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat terkendala karena adanya reconfusing anggaran mencapai 90%.

(2) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

- a. Kurangnya tanggapan OPD dalam pengusulan kerja sama sebagai bahan penyusunan rencana kerja sama tahunan.
- b. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam pemetaan dan penentuan batas wilayah.
- c. Terbatasnya kemampuan anggaran untuk melakukan pemetaan wilayah
- d. Lambatnya respon OPD dalam menyampaikan permintaan data dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan SPM.
- e. Lambatnya respon OPD dalam menghadiri rapat-rapat koordinasi
- f. Kurangnya koordinasi antar OPD

(3) Bagian Hukum

- a. Kurang tanggapnya Perangkat Dinas Terkait tentang Permasalahan Hukum Perdata atau Tata Usaha Negara di Pengadilan

- b. Kurangnya sarana dan prasarana lapangan dalam penanganan perkara pengadilan.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana (PC/Komputer/Laptop, Printer, Lemari Arsip, Ruang Perustakaan Hukum & JDIH) untuk dokumentasi dan informasi produk hukum
- d. Kurang tertib administrasinya perangkat Daerah Pemrakarsa dalam penyerahan arsip softcopy (Perda dan Perbup) dan hardcopy Produk Hukum Daerah (Perda, perbup dan SK Bupati) sehingga memperlambat pengerjaan dan pengiriman laporan dokumentasi dan informasi hukum
- e. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah mengenai Legal Drafting penyusunan produk hukum sehingga menyebabkan lambatnya proses penyusunan produk hukum
- f. Lambatnya Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil perbaikan SK, Perbup dan Perda sehingga membuat terhambatnya/ lambatnya pekerjaannya
- g. Lambatnya perangkat daerah pemrakarsa dalam proses perbaikan Ranperbup/Ranperda sesuai hasil harmonisasi dari Kanwil Kemenkumham

#### (4) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Belum maksimalnya Perangkat Daerah dalam penginputan RUP
- b. Anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia PBJ
- c. Kurangnya jumlah fungsional pengelola PBJ sebagaimana yang direkomendasikan oleh LKPP.
- d. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SPSE dalam penginputan E-kontrak.
- e. Belum adanya TPP khusus di UKPBJ Kabupaten Padang Pariaman

(5) Bagian Administrasi Pembangunan

- a. Masih ada Perangkat Daerah yang menyerahkan laporan belum tepat waktu
- b. Terbatasnya anggaran, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi tidak bisa dilaksanakan dengan optimal
- c. Belum optimalnya penggunaan aplikasi sistem informasi pelaksanaan administrasi dan pelaporan pembangunan karena terbatasnya sarana dan prasarana

(6) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Belum optimalnya pelaksanaan dalam upaya dalam pengendalian inflasi yang dilakukan oleh OPD teknis Karena kurangnya anggaran.
- b. Lamanya data terbit PDRB Income Perkapita yang Baru di Publish Maret tahun berikutnya oleh BPS.
- c. Tidak terlaksananya kegiatan Bimtek BUMD/BLUD
- d. Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga harga pupuk tidak terpantau.

(7) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- a. Masih kurang maksimal dalam memfasilitasi Keprotokolan kegiatan Pimpinan, karena kurangnya kompetensi SDM sebagai Protokol dan kurangnya SDM.
- b. Sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi keprotokolan seperti kendaraan roda empat, laptop belum memadai.
- c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan belum maksimal, perlengkapan seperti kamera sangat minim sekali

(8) Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Terjadinya pembatasan realisasi dikarenakan devisit anggaran dan pembatasan keluar daerah dan salahnya penempatan RAK kegiatan.
- b. Terjadinya Kekosongan Analis Perencanaan pada Sekretariat Daerah sehingga pengerjaan Perencanaan Sekretariat Daerah dilakukan secara bersama membuat susahnya pengambil keputusan dalam pengerjaan perencanaan.
- c. Masih adanya kendala pada jaringan internet untuk SIPD dan masih ada beberapa Bendahara bagian-bagian yang masih belajar menggunakan SPID sehingga lama dalam pengimputan SPJ, sehingga memperlambat administrasi keuangan.
- d. Proses meminta data ke bagian-bagian yang masih memakan waktu cukup lama, sehingga memperlambat proses pembuatan laporan.
- e. Akibat kekosongan analis perencanaan pada Sekretariat Daerah membuat proses perencanaan belum terlalu mengarah kepada skala prioritas dan indikator kinerja utama.

(9) Bagian Umum

- a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM di Bagian Umum.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana di Bagian Umum.
- c. Terjadinya rasionalisasi terhadap anggaran akibat terbatasnya anggaran

(10) Bagian Organisasi

- a. Lamanya proses verifikasi dari KemenPANRB terhadap usulan rekomendasi jabatan pelaksana yang telah dikirim

- b. Belum optimalnya perangkat daerah dalam menginput aplikasi e-SAKIP Pemerintah Daerah (SIMAK Kinerja).
- c. Masih terdapat perangkat daerah yang melaporkan dokumen lkjip tidak tepat waktu.
- d. Belum berjalannya pelaksanaan rencana aksi agen perubahan tingkat daerah
- e. Kurangnya anggaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk seluruh UKPP
- f. Kompetensi SDM pada setiap UKPP belum memadai sehingga masih banyak SDM tersebut yang belum memahami produk layanannya sendiri

#### **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menginformasikan Gambaran Umum Sekretariat Daerah, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun anggaran 2020.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **a. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah**

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Sekretariat

Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

#### b. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada khususnya, serta pembangunan regional dan nasional pada umumnya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Mewujudkan aparatur negara yang profesional memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah Sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

#### **A. Rencana Strategis**

Setelah berakhirnya perodesasi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021, maka sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjaga kesinambungan pembangunan disusunlah RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang baru. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2026 merupakan tahapan kelima dari RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 – 2025. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan peluang serta isu – isu



strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, maka visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Padang Pariaman Berjaya.”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan misi diatas, misi yang cocok dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah misi pertama: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat bersandi syarak, syarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum, misi ketiga: Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat, misi kelima: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

## **B. Cascading**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target IKU secara vertikal dari level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit atau pegawai yang lebih rendah. Penyelarasan adalah proses penyelarasan SS, IKU, dan/atau target IKU secara horizontal antar unit/pegawai yang selevel.

Sesuai RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2026, cascading Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memuat misi Bupati Padang Pariaman yakni misi pertama “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban”, misi ketiga “Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat” dan misi kelima “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan”.

Untuk mendukung hal tersebut terdapat 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang terkait dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yakni:

1. Meningkatkan peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
  3. Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah
  4. Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement
  5. Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik
  6. Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah instansi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran visi

Sekretariat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman, tujuan dan sasaran strategis dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah 2021-2026**

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Padang Pariaman Berjaya (Unggul BERkelanjutan Religius, seJAhtera da berbudaYA)	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target
				Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti 2. jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina
	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (ADHB)	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan 2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah
				Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB 2. Persentase Penggunaan Eprocurement terhadap Belanja Pengadaan 3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti

#### D. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2024

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan 6 indikator kinerja utama yang diharapkan mampu menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah



Daerah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah rincian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	$\frac{\text{Jumlah indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencapai target}}{\text{Indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah keseluruhan}} \times 100\%$
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kebijakan peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kebijakan peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya seluruhnya}} \times 100\%$
		2. jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	<i>Jumlah Akumulasi lembaga pendidikan alquran yg telah dibina</i>
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	<i>Nilai IKK dari LAN RI</i>
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	$\frac{\text{jumlah bahan kebijakan yang ditetapkan}}{\text{bahan kebijakan yang terdaftar}} \times 100\%$
4	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatkan pemanfaatan e- procurement	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kebijakan e procurement yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah kebijakan e procurement}} \times 100\%$
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	$\frac{\text{Jumlah Unit Kerja Dengan IKM Bernilai Baik}}{\text{Jumlah Unit Kerja Yang Disurvei IKM}} \times 100\%$
6	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah LHE SAKIP Pemda yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah LHE SAKIP Pemda}} \times 100\%$

**E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan

sanksi. Perjanjian kinerja tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk perodesisasi 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah**

**Periodesisasi 2021-2026**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100%
		2. jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	5 Lembaga
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60 (cukup)
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%
4	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatakan pemanfaatan e-procurement	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	13%
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
6	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja setiap indikator dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 4 (empat) tujuan dan 5 (lima) sasaran yang akan dicapai. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- > 100%                    = Sangat Berhasil
- 90% s . d < 100%       = Berhasil
- 80% s . d < 90%        = Cukup Berhasil
- 60% s . d < 80%        = Sedang
- 0% s . d < 60%         = Gagal

#### **A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 Perodesisasi 2021-2026**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat disimpulkan bahwa 2 indikator “sangat berhasil”, 2 indikator “berhasil” dan 1 indikator "Gagal".

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			TARGET KINERJA	REALISASI	PERSEN (%)
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%	Proses Pengerjaan	-
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100%	117 %	117
		2. Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	5 Lembaga	5 lembaga	100
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60 (cukup)	56,40	94
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%	98,70 %	98,70
4	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	13%	13 %	100
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%	94 %	94
6.	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100

Paraf Verifikasi

Ka. Bapelitbangda

Inspektur

Kabag Organisasi

REVIU BERJENJANG

Kebua Tim

Dalniss

Wanjab

Tanggal Paraf

Tanggal Paraf

Tanggal Paraf

30/5/24

30/5/24

30/5/24

LKIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

## Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 :

<b>Sasaran 1 :</b> <b>Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>
--

### **Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencapai Target**

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-1 yaitu “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencapai Target.

Capaian kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Capaian kinerja ini meliputi berbagai aspek, seperti kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja.

#### Capaian kinerja makro

Indeks pembangunan manusia, Angka kemiskinan, Angka pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, Ketimpangan pendapatan.

#### Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

- Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- Kinerja pelaksana tugas pembuatan dan penerapan standar pelayanan minimal Akuntabilitas kinerja Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

LPPD merupakan laporan capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun sebagai dasar evaluasi penilaian capaian kinerja.

LPPD juga memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa rekomendasi tersebut, antara lain: Peningkatan pelayanan publik, Pengembangan SDM dan infrastruktur, Penguatan koordinasi lintas OPD

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencapai Target:

a) **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target Dan Capaian Persentase Indikator Kinerja Kunci**  
**Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	%	100%		100	Proses Pengerjaan

b) **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Berikut ini adalah perbandingan target Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target dan Capaian LPPD**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	%	100%	-	100	100%	-	100	Tahun 2023 masih menunggu proses penilaian mendagri Tahun 2024 dalam proses pengerjaan

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih menunggu proses penilaian mendagri di tahun 2023 dan tahun 2024 masih dalam proses pengerjaan.

c) **Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Faktor pendukung dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah dukungan dari berbagai pihak. Sementara faktor penghambat meliputi kurangnya koordinasi, sumber daya, dan peralatan.

Faktor pendukung Dukungan dari berbagai pihak, Peran serta dari semua pihak.

Faktor penghambat

- Kurangnya koordinasi dan komunikasi
- Sumber daya pegawai dan peralatan yang terbatas
- Belum tersedianya SOP penyusunan LPPD
- Belum adanya dukungan dari pihak-pihak yang berwenang
- Penyusunan LPPD masih bersifat manual dan lambat
- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Kurangnya komitmen dan motivasi pegawai
- Kompetensi SDM yang kurang
- Penilaian atas hasil kerja yang kurang
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) tidak masuk dalam dokumen perencanaan daerah

#### **d) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja**

Strategi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah dengan membentuk tim penyusun, mengumpulkan data, dan melakukan verifikasi data.

Tahapan penyusunan LPPD

1. Membentuk tim penyusun dan tim pereviu
2. Mengumpulkan data dan dokumen pendukung
3. Menyusun, memverifikasi, dan menilai data dasar capaian kinerja
4. Menyusun rancangan LPPD, LKPJ, dan RLPPD
5. Menetapkan dokumen LPPD, LKPJ, dan RLPPD

Komponen-komponen LPPD

LPPD adalah laporan yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Laporan ini disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun.

#### **e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Kunci keberhasilan penyusunan LPPD

- Komitmen bersama
- Pemantauan berkala
- Koordinasi yang berkesinambungan

- Data yang berkualitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan
- Kerja sama yang erat antara penyusun LPPD dan admin atau pejabat terkait
- Memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses penyusunan berlangsung

LPPD merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik.

**Gambar 1.**  
**Rapat Evaluasi data Capaian LPPD tahun 2024**



*Sumber : Bagian TPKS Kab. Padang Pariaman*

#### **f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dibutuhkan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 16.551.000 dengan persentase

realisasi keuangan sebesar 55,17 %. Realisasi kinerja sasaran strategis masih dalam tahapan proses.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	Proses Pengerjaan	55,17 %	44,83 %

Efisiensi Capaian Kinerja = penilaian capaian kinerja masih dalam tahap proses pengerjaan

Efisiensi Penyerapan Anggaran =  $100\% - 55,17\% = 44,83\%$

Total Efisiensi =  $0 + 44,83\% = 44,83\%$

<p><b>Sasaran 2 :</b></p> <p><b>Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya</b></p>
---

**1. Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.**

Dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang religus, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Salah satunya adalah pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti yaitu pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan, hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor

67/KEP/BPP/2024 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Rumah Ibadah tahun 1445 H/2024 dan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 132/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Safari Ramadhan dan Penetapan Lokasi Kunjungan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman tahun 1445 H/2024 M.

Secara teknis pelaksanaan kegiatan ini yaitu kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten ke 120 Masjid/ Mushalla penerima bantuan Safari Ramadhan, dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Bantuan yang diberikan pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya masyarakat kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti dalam kegiatan safari Ramadhan yaitu 120 Masjid/Mushalla sedangkan target yang ditetapkan adalah 120 Masjid/Mushalla dengan kategori **“Berhasil”**, Artinya 120 Masjid/Mushalla telah dikunjungi tim Safari Ramadhan dan diberikan bantuan masing-masing Masjid/Mushalla sebesar Rp. 7.500.000,-

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.	Persen (%)	-	-	-	100%	100%	100%	Berhasil

Total Masjid/Mushalla = 120 Masjid/Mushalla.

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

Hal ini karena adanya dana yang tersedia dari APBD Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2024.

Keberhasilan Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti dalam kegiatan Safari Ramadhan bukan hanya tanggung jawab Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, FORKOMPINDA dan masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Target dan realisasi dapat tercapai sepenuhnya, berkat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar. Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman



Gambar. Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman



Gambar. Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya”

dibutuhkan anggaran Rp. 900.000.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 900.000.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 100 %. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

#### Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti	100%	100 %	0 %

Efisiensi Capaian Kinerja =  $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran =  $100\% - 100\% = 0\%$

Total Efisiensi =  $0\% + 0\% = 0\%$

#### A. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan ini dapat terlaksana karena komitmen dari Pemerintah Daerah dan dukungan dari FORKOMPINDA dan masyarakat Padang Pariaman, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 900.000.000,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 900.000.000,-. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 0%, dikarenakan APBD menyediakan semua anggaran sebesar Rp. 900.000.000.

#### B. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Terjalinya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah, FORKOMPINDA dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.
- Komitmen Kepala Daerah dalam membuat kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti untuk masyarakat Padang Pariaman

Berikut adalah tabel 120 Masjid/Mushalla Penerima Bantuan Safari Ramdahan tahun 2024.

NO	NAMA MASJID/ MUSHALLA/ SURAU	NAGARI
Nan Sabaris		
1	Surau Rimbo	Padang Bintungan
2	Masjid Raya Padang Kandang	Padang Kandang Pulau Aia Padang Bintungan
3	Musholla Al-Ikhlas	Kurai Taji
4	Masjid Raya Sungai Laban	Kurai Taji Timur
5	Masjid Darussalam	Sunua Barat
6	Mesjid Baitul Makmur	Sunua
7	Mesjid Raya Sunur	Sunua Tengah
8	Musholla Angga Baru	Pauh Kamar
9	Mesjid Raya At-Tagwa	Kapalo Koto
10	Surau Gadang Tonggak	Padang Kandang Pulau Aia Padang Bintungan
Lubuk Alung		
11	Surau Al-Ikhlas	Balah Hilir Lubuk Alung
12	Musholla Darul Wustha	Aie Tajun Lubuk Alung
13	Surau Balanti	Sikabu Lubuk Alung
14	Surau Tawaqal	Punggung Kasiak Lubuk Alung
15	Mesjid Al-Ikhlas	Sungai Abang Lubuk Alung
16	Surau Darussalam Tanah Taban	Pasia Laweh Lubuk Alung
17	Mesjid Muhajirin	Lubuk Alung
18	Surau Ambacang	Singguliang Lubuk Alung
19	Mesjid Jami' Syech Burhanudin	Salibutan Lubuk Alung
20	Masjid Al Furqan	Balah Hilir Lubuk Alung
2x11 Enam Lingkung		
21	Surau Aie Datang	Sicincin
22	Surau Patamuan Jambak Sigaung	Sungai Asam
23	Surau Pincuran Tembok	Lubuk Pandan
24	Masjid Raya Pauh	Sicincin

Enam Lingkung		
25	Surau Kandang Gadang	Pakandangan
26	Masjid Ikhlas Balah Aie	Koto Tinggi
27	Surau Kapuah	Gadur
28	Surau Korong Padang Baru	Parik Malintang
29	Pesantren Darul Ikhlas Batang Kapecong	Toboh Ketek
30	Masjid Raya Lubuk Idai	Koto Tinggi
2 x 11 Kayutanam		
31	Surau Batang Tapakih	Anduriang
32	Musholla Baithul Makmur	Guguak
33	Mesjid Al-Muttaqin	Kayutanam
34	Musholla Nurul Ikhlas	Kapalo Hilalang
35	Masjid Alhuda Tarok	Kapalo Hilalang
Patamuan		



36	Surau Jambak	Tandikek
37	Masjid Raya Labu Kambu	Tandikek Selatan
38	Surau Talang Kuniang	Tandikek Utara
39	Surau Polongan Lapau Jambu	Sungai Durian
40	Mesjid Raya Koto Mambang Kampuang Tanjung	Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai durian
41	Surau Batu	Tandikek Barat
42	Masjid Al Hidayah	Tandikek
V Koto Timur		
43	Surau Baru Simpang Gantiang	Kudu Gantiang
44	Mesjid Al Ihsan	Limau Puruik
45	Surau Baru Sungai Kalu	Kudu Gantiang Barat
46	Mesjid Raya Kayu Angik	Gunuang Padang Alai
47	Masjid Nurul Iman	Kudu Gantiang
Batang Gasan		
48	Masjid Raya Gasan Gadang	Gasan Gadang
49	Musholla Nurul Yaqin	Malai V Suku
50	Masjid Raya Balingkuang	Malai V Suku Timur
51	Surau Kampung Tengah	Malai V Suku
Padang Sago		
52	Surau Lapai	Koto Dalam Barat
53	Surau Ungku Abun	Koto Dalam
54	Mesjid Istiqomah	Koto Dalam Selatan
55	Surau Dagang Pasar Padang Sago	Batu Kalang
56	Surau Jambu	Batu Kalang Utara
57	Mesjid Nurul Huda	Koto Baru
58	Surau Mangoi	Batu Kalang
Sintuk Toboh Gadang		
59	Masjid Nurul Iman Palambayan	Sintuak
60	Masjid Al-Hasyar	Toboh Gadang
61	Surau Rambai Toboh Padang Kapeh	Toboh Gadang Selatan
62	Surau Buluah Apo	Toboh Gadang Timur
63	Surau Ketek Toboh Musajik	Toboh Gadang Barat
64	Surau Takapik	Sintuak
Ulakan Tapakis		
65	Surau Manggih Al-Ikhlis	Sungai Gimba Ulakan
66	Surau Kampung Paneh	Padang Toboh Ulakan
67	Surau Jawi-Jawi	Manggopoh Palak Gadang Ulakan
68	Surau Labuah	Sandi Ulakan
69	Surau Parupuak	Ulakan
70	Surau Gauang	Seulayat Ulakan
71	Surau Kalampaian	Kampaung Galapuang Ulakan
72	Surau Korong Syekh H. Musa	Tapakih
73	Surau Rawang	Ulakan
IV Koto Aur Malintang		
74	Musholla Nurul Hidayah	III Koto Aur Malintang Utara
75	Surau Pauah	III Koto Aur Malintang
76	Surau Lenong	Balai Baiak Malai III koto



77	Mesjid Istiqomah	III Koto Aur Malintang Selatan
78	Surau Nurul Taqwa	III Koto Aur Malintang Timur
79	Surau Duku	III Koto Aur Malintang
Sungai Limau		
80	Masjid Taqwa	Pilubang
81	Musholla Paraman Talang	Kuranji Hilir
82	Surau Anjuang	Koto Tinggi Kuranji Hilir
83	Mesjid Nur Ikhlas	Guguak Kuranji Hilir
84	Masjid Mustaqim Padang Olo	Kuranji Hilir
Sungai Geringging		
85	Surau Lansano Buluh Apo	Malai III Koto
86	Surau Kampuang Batu Mengaum	Kuranji Hulu
87	Musholla Nurul Falah Kampuang Tengah	Batu Gadang Kuranji Hulu
88	Surau Durian Kambuik	Sungai Sirah Kuranji Hulu
89	Surau Ungku Tuo	Kuranji Hulu

V Koto Kampung Dalam		
90	Musholla Taqwa Tandikat	Campago
91	Musholla Al-Hidayah Tapai Aia Lansano	Sikucur
92	Musholla Kincie Tampaiak Kinaro	Sikucur Tengah
93	Mesjid Darussalam	Sikucur Utara
94	Musholla Taqwa (Surau Ampangan)	Campago Selatan
95	Musholla Baiturrahman	Sikucua Timur
96	Surau Ambacang Korong Bayur	Campago Barat
97	Masjid Nurul Hidayah	Sikucua Barat
98	Ponpes Dinul Maruf	Sikucur
VII Koto		
99	Musholla Nurul Falah	Lareh Nan Panjang
100	Surau Kijang	Lareh Nan Panjang Barat
101	Musholla Kampung Dama	Lareh Nan Panjang Selatan
102	Surau Sianik	Lurah Ampalu
103	Surau Tengah Padang	Balah Aia
104	Mesjid Sungai Tareh	Balah Aia Utara
105	Surau Nurul Iman	Balah Aie Timur
106	Surau Dagang	Sungai Sariak
107	Surau Manggih	Lareh Nan Panjang Sungai Sariak
108	Musholla Panti Kayu	Bisati Sungai Sariak
109	Surau Labuah	Limpato Sungai Sariak
110	Surau Al-Faizin	Ambuang Kapua Sungai Sariak
111	Surau Kampuang Tengah	Limpato
Batang Anai		
112	Musholla Nurul Hidayah Pangka Rajang	Sungai Buluh Timur
113	Musholla Al hasanah	Kataping
114	Surau Amanah	Sungai Buluh Barat
115	Mesjid Asra	Kasang



116	Musholla Darussalam	Sungai Buluh
117	Musholla Taqwa	Buayan
118	Musholla Al-Ikhlas Gunung	Sungai Buluh Selatan
119	Musholla Nurul Yaqin	Sungai Buluh Utara
120	Surau Kampung Jambak	Kasang

## 2. Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina

### A. Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina

Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga pendidikan Alquran yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Alqur'an dan kegiatan menghafal Alquran.

Persentase Lembaga Pendidikan yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

Dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Salah satunya adalah meningkatkan Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman:

**Tabel 3.6**  
***Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024***

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina	5	5	100%	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yaitu 5 Lembaga sedangkan target yang ditetapkan adalah 5 Lembaga dengan kategori "**Berhasil**", Artinya 5 Lembaga Pendidikan Al-Qur'an telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang diadakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Persentase**  
**Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten**  
**Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina	Lembaga	5	5	100%	5	5	100%	Berhasil

Total lembaga yang dibina : 5 lembaga

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina pada tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

Keberhasilan peningkatan kehidupan yang religius terutama Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, bukan hanya tanggung jawab Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Target dan realisasi dapat tercapai sepenuhnya, berkat tingginya minat putra-putri Padang Pariaman dalam belajar Al-Qur'an yang di dukung semakin banyaknya Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar. Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Alquran



Gambar. Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Alquran



Gambar. Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Alquran

## B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya” dengan indicator sasaran strategis “Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina” dibutuhkan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 0 dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak memadai,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0 %. Tetapi Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

### Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina	100%	0 %	100 %

Efisiensi Capaian Kinerja =  $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran =  $100\% - 0\% = 100\%$

Total Efisiensi =  $0\% + 100\% = 100\%$

#### C. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan ini dapat terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak di Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sekolah penyelenggaran Rumah Tahfiz, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 0,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 30.000.000,-. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 100%, dikarenakan APBD tidak menyediakan anggaran.

#### C. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Terjalinya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya sekolah tempat Rumah Tahfiz dilaksanakan
- Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sangatlah tinggi

Berikut adalah tabel 5 Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2023.

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	Rumah Tahfiz SDN 05 2x11 Enam Lingkung	Enam Lingkung
2	Rumah Tahfiz SDN 07 Sintuk Toboh Gadang	Sintuk Toboh Gadang
3	Rumah Tahfiz SDN 08 Enam Lingkung	Enam Lingkung
4	Rumah Tahfiz SMPN 1 Ulakan Tapakis	Ulakan Tapakis
5	Rumah Tahfiz SMPN 1 Nan Sabaris	Nan Sabaris

Berikut adalah tabel 5 Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2024.

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	Rumah Tahfiz SDN 05 2x11 Enam Lingkung	Enam Lingkung
2	Rumah Tahfiz SDN 07 Sintuk Toboh Gadang	Sintuk Toboh Gadang
3	Rumah Tahfiz SDN 08 Enam Lingkung	Enam Lingkung
4	Rumah Tahfiz SMPN 1 Ulakan Tapakis	Ulakan Tapakis
5	Rumah Tahfiz SMPN 1 Nan Sabaris	Nan Sabaris

	<p><b>Sasaran 3:</b></p> <p><b>Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah</b></p>
--	---

### Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Meningkatkan peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah nilai Indeks Kualitas Kebijakan.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur proses pembuatan kebijakan, pengelolaan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan. Dengan kata lain, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional.

Ruang lingkup jenis kebijakan yang diajukan sebagai sasaran pengukuran kualitas kebijakan dengan instrumen IKK diambil menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu dimulainya pengukuran IKK;

- Kebijakan yang sifatnya tidak rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu dan kebijakan yang tidak mengatur ke dalam/internal instansi.

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah:

**a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

**Tabel 3.8**  
**Capaian Persentase Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)**  
**Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Interpretasi
	Target	Capaian	%	
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	60	56,40	94 %	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2024 yaitu 94% dari target yang ditetapkan dengan kategori **“Berhasil”**.

**b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Pelaksanaan Self Assesment Indeks Kualitas Kebijakan baru dilaksanakan di tahun 2024.

**c) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan dari capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

- 1) Komitmen pimpinan, baik pimpinan daerah maupun pimpinan OPD, dalam melaksanakan Self Assesment Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
- 2) Sinergitas yang baik oleh Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari admin instansi yang bertugas untuk mengelola seluruh proses penilaian IKK pada portal SI IKK dan Tim Enumerator yang melaksanakan teknis/operasional penilaian IKK dalam portal SI IKK;
- 3) Rutin melakukan rapat koordinasi Tim SAKIP Kabupaten untuk memastikan capaian kinerja dengan tujuan kinerja berdasarkan selaras rencana kerja yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk agenda penyelesaian kinerja.

**d) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Self Assessment IKK 2024 ;
2. Melakukan penyusunan SK Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah.

e) **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Belum dianggarkan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan.

**1. Pelaksanaan Rapat Persiapan Self Assesment Indeks Kualitas Kebijakan**



**2. Upload Populasi Kebijakan**

ADMIN INSTANSI (Kabupaten Padang Pariaman 2024) | Ali Mustofa, S.STP., MM.

No	Nama Kebijakan	Tanggal Berlaku	File	Status
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	07/11/2023		Ditolak
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020			

No	TITLE	TANGGAL	STATUS
5	TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	20/12/2023	Ditolak
6	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 - 2043	10/11/2023	Ditolak
7	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA DAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME	17/05/2021	Proses
8	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	26/08/2021	Proses
9	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES	22/10/2021	Disetujui
10	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI	23/09/2021	Disetujui
11	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PERAN NAGARI DALAM KONVERGENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING	23/09/2021	Proses
12	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEMANTAUAN PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN GANGGUAN TUMBUH KEMBANG ANAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	24/09/2021	Disetujui

### 3. Aktivasi akun enumerator

ikklan.go.id/enumerator

ADMIN INSTANSI (Kabupaten Padang Pariaman 2024) Ali Mustofa, S.STP., MM.

Daftar Kebijakan

MASTER DATA

Daftar Enumerator

BANTUAN

Help Desk

DATA ENUMERATOR Tambah Enumerator

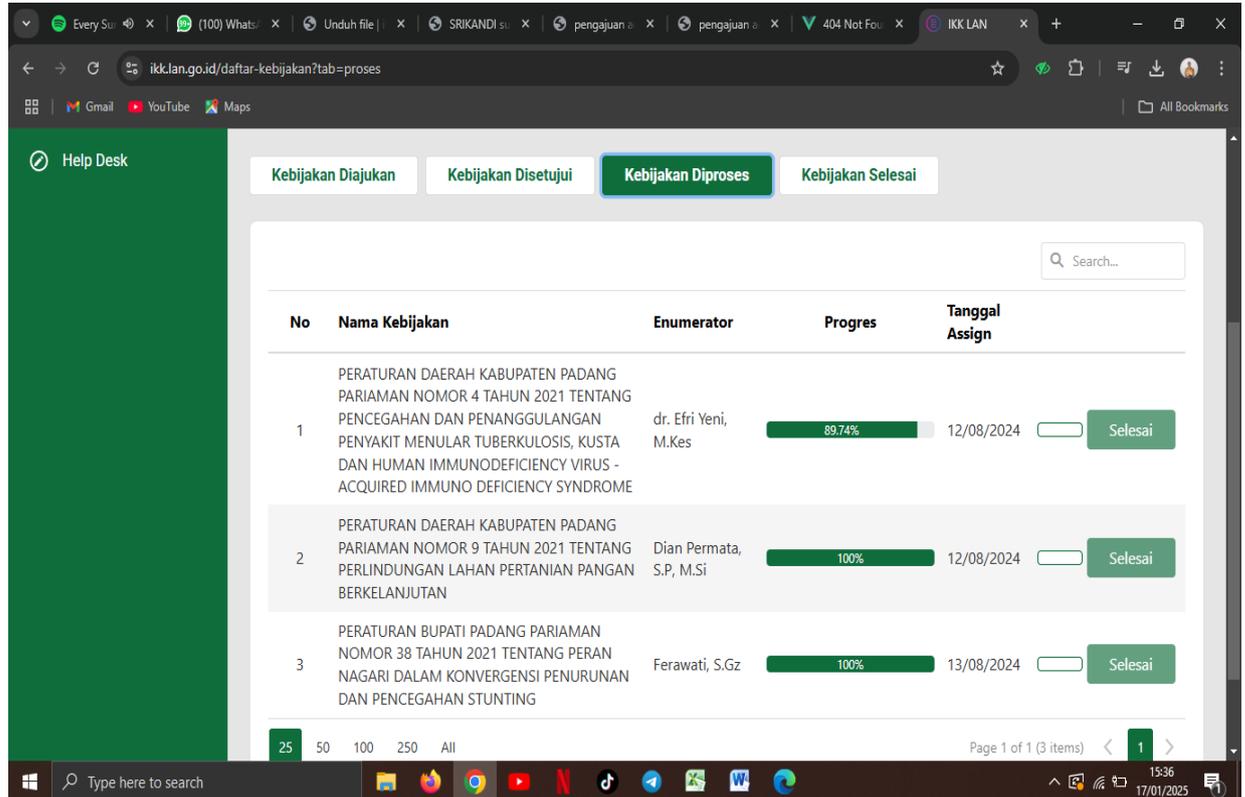
Search...

No	Nama	Unit Kerja	NIP		
1	dr. Efri Yeni, M.Kes	Dinas Kesehatan	197304082002122002	Ubah	Hapus
2	Dian Permata, S.P, M.Si	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	198411142009021001	Ubah	Hapus
3	Ferawati, S.Gz	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	198405092008042001	Ubah	Hapus

25 50 100 250 All Page 1 of 1 (3 items) 1



#### 4. Enumerator Input data kebijakan



The screenshot shows a web application interface for managing regional policies. The main content area displays a table with the following data:

No	Nama Kebijakan	Enumerator	Progres	Tanggal Assign	
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA DAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME	dr. Efri Yeni, M.Kes	89.74%	12/08/2024	<input type="checkbox"/> Selesai
2	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	Dian Permata, S.P, M.Si	100%	12/08/2024	<input type="checkbox"/> Selesai
3	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PERAN NAGARI DALAM KONVERGENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING	Ferawati, S.Gz	100%	13/08/2024	<input type="checkbox"/> Selesai

#### Persentase bahan kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah

Bahan kebijakan daerah adalah bahan yang disiapkan untuk merumuskan kebijakan pemerintah daerah. Bahan kebijakan daerah dapat disiapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Bahan kebijakan daerah yang disiapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan:

- Bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan
- Bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama
- Bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi kewilayaan
- Bahan perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah
- Bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
- Bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
- Bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
- Bahan pelaksanaan pembinaan administrasi

#### Kebijakan daerah

Kebijakan daerah adalah peraturan daerah atau keputusan gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan.

#### Sekretariat daerah



Sekretariat daerah membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Sekretariat daerah juga bertugas untuk:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
- Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
- Membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah:

**a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

**Tabel 3.9**  
**Capaian Persentase Persentase bahan kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Interpretasi
	Target	Capaian	%	
Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100 %	98,70 %	98,70	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah 2024 yaitu 98,70% dari target yang ditetapkan dengan kategori **“Berhasil”**.

**b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Untuk perbandingan Target tahun 2023 mencapai 90,03 % di tahun 2024 meningkat menjadi 98,70 %

**c) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Faktor pendukung penetapan kebijakan adalah kondisi yang membantu kegiatan berjalan, sedangkan faktor penghambat adalah kondisi yang menghambat kegiatan berjalan.

Faktor pendukung :

- Komunikasi,
- Struktur birokrasi,
- Sumber daya,
- Disposisi.

Faktor penghambat

- Isi kebijakan yang kurang jelas
- Kurangnya ketetapan kebijakan
- Kekurangan sumber daya
- Kekurangan informasi
- Kurangnya dukungan

- Keterbatasan anggaran
- Keterbatasan sumber daya manusia
- Keterbatasan sumber daya fasilitas pendukung
- Ketidapatuhan masyarakat terhadap kebijakan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, antara lain: Komunikasi, Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, Faktor sumber daya, Sikap pelaksana.

#### **d) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja**

Langkah-langkah dalam strategi penetapan kebijakan secara umum adalah:

- Identifikasi masalah, Penyusunan agenda, Perumusan kebijakan, Pengesahan kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan

#### **e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Kunci keberhasilan dalam penyusunan kebijakan adalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, kebijakan juga harus didasarkan pada prinsip demokrasi, transparansi, akuntabel, dan keadilan.

Faktor-faktor keberhasilan penyusunan kebijakan

- **Komunikasi**

Komunikasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

- **Sumber daya**

Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi kebijakan.

- **Disposisi**

Disposisi yang baik dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

- **Struktur birokrasi**

Struktur birokrasi yang efektif dan efisien dapat mendukung implementasi kebijakan.

- **Demokrasi, transparansi, akuntabel, dan keadilan**

Kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut.

Langkah-langkah penyusunan kebijakan

Identifikasi masalah kebijakan, Penyusunan agenda, Perumusan kebijakan, Pengesahan kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan





**f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah” dengan indicator sasaran strategis “Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah” dibutuhkan anggaran Rp. 70.008.500,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp Rp 60.148.600 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 85,91 %. dan Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 98,70%. Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	<b>Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah</b>	Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	98,70%	85,91	14,09

Efisiensi Capaian Kinerja =  $98,70\% - 100\% = - 1,30\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran =  $100\% - 85,91\% = 14,90\%$

Total Efisiensi =  $-1,30\% + 14,90\% = 13,6\%$

<p><b>Sasaran 4 :</b></p> <p><b>Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement</b></p>
--

Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-2 yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti.

E-Procurement Merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan E-Procurement Adalah aturan, pedoman, atau instruksi yang ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Capaian Sasaran Strategis:

Mengukur seberapa efektif kebijakan e-procurement yang telah ditetapkan berhasil diterapkan dalam praktik pengadaan barang/jasa. Ini bisa diukur dari berbagai aspek, seperti:

1. Jumlah transaksi yang menggunakan e-procurement: Semakin banyak transaksi yang menggunakan sistem elektronik, semakin tinggi capaiannya.
2. Persentase kebijakan e-procurement yang ditindaklanjuti: Menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam pengadaan.
3. Efisiensi waktu dan biaya: E-procurement diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses pengadaan.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Sistem elektronik mempermudah pengawasan dan pelacakan proses pengadaan. Capaian kinerja makro

Indikator ini penting karena:

- Mendukung tata kelola yang baik: Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan.
- Mengurangi praktik korupsi: Sistem elektronik dapat meminimalkan celah untuk tindakan korupsi.
- Mendorong persaingan sehat: E-procurement membuka peluang bagi lebih banyak penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi.

- Meningkatkan kualitas pengadaan: Sistem elektronik dapat membantu memastikan kualitas barang/jasa yang diadakan.

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target:

**a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

**Tabel 3.10**  
**Target Dan Capaian Persentase Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	%	13	13	100	Berhasil

**b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Berikut ini adalah perbandingan target Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti Target pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	%	n/a	n/a	n/a	13	13	100	Berhasil

Pada tabel 3.11, dapat dilihat bahwa indicator Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti di tahun 2023 belum dilaksanakan sedangkan untuk tahun 2024 capaian indikator sasaran telah mencapai 100% dan dikategorikan Berhasil.

### c) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor pendukung utama dalam mencapai persentase kebijakan e-procurement yang tinggi adalah adopsi teknologi, regulasi yang mendukung, dan peningkatan kesadaran akan manfaat e-procurement. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi kendala teknis, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta potensi risiko keamanan data.

Faktor Pendukung:

- Adopsi Teknologi:

Infrastruktur teknologi yang memadai dan sistem e-procurement yang user-friendly akan memudahkan proses pengadaan barang dan jasa.

- Regulasi yang Mendukung:

Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan mendukung pelaksanaan e-procurement akan menciptakan kepastian hukum dan mendorong adopsi yang lebih luas.

- Peningkatan Kesadaran:

Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat e-procurement, seperti transparansi, efisiensi, dan efektivitas, dapat meningkatkan minat dan partisipasi dalam sistem ini.

Faktor Penghambat:

- Kendala Teknis:

Masalah teknis seperti gangguan sistem, koneksi internet yang lambat, atau ketidakstabilan platform e-procurement dapat menghambat kelancaran proses pengadaan.

- Kurangnya Sumber Daya Manusia:

Kurangnya tenaga ahli dalam bidang e-procurement, baik dari sisi pengguna maupun penyedia barang dan jasa, dapat menjadi hambatan.

- Potensi Risiko Keamanan Data:

Ancaman keamanan data seperti pencurian data atau peretasan sistem dapat menjadi penghalang utama dalam implementasi e-procurement.

Kurangnya Partisipasi Pengguna:

- Ketidakaktifan atau kurangnya minat dari pengguna dalam menggunakan sistem e-procurement dapat menghambat pencapaian target.

### d) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

#### 1. Investasi dalam Infrastruktur TI:

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TI yang mendukung e-procurement.

#### 2. Pelatihan dan Pengembangan SDM:

Memberikan pelatihan intensif kepada aparatur pemerintah dan pelaku usaha mengenai penggunaan sistem e-procurement.

### 3. Peningkatan Keamanan Data:

Menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data dari ancaman siber.

### 4. Sosialisasi dan Edukasi:

Terus-menerus mensosialisasikan manfaat e-procurement kepada seluruh pemangku kepentingan.

### 5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:

Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem e-procurement dan melakukan perbaikan berdasarkan temuan.

## e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai peningkatan persentase kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, beberapa program dan kegiatan berikut dapat dipertimbangkan:

#### 1. Peningkatan Infrastruktur dan Sistem:

- Pengembangan Platform e-Procurement:

Membangun atau meningkatkan sistem e-procurement yang andal, aman, dan mudah digunakan. Ini termasuk memastikan platform dapat diakses oleh semua penyedia dan pengguna, serta memiliki fitur yang lengkap untuk seluruh proses pengadaan.

- Penyediaan Akses Internet:

Memastikan ketersediaan akses internet yang stabil dan terjangkau di seluruh wilayah kerja, terutama bagi penyedia potensial yang berada di daerah terpencil.

- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

Memberikan pelatihan kepada pengguna sistem e-procurement (baik dari pihak pemerintah maupun penyedia) mengenai cara penggunaan sistem, serta pemahaman mengenai kebijakan e-procurement.

#### 2. Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman:

- Sosialisasi dan Edukasi:

Melakukan sosialisasi yang masif mengenai manfaat dan prosedur e-procurement kepada seluruh stakeholder, termasuk pelaku usaha, masyarakat, dan aparaturnya pemerintah.

- Pendidikan dan Pelatihan:

Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai e-procurement bagi aparaturnya pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan.

- Penyusunan Panduan:

Menyusun panduan teknis dan operasional yang jelas dan mudah dipahami terkait pelaksanaan e-procurement, termasuk contoh kasus dan FAQ.

### 3. Pengawasan dan Evaluasi:

- **Monitoring dan Evaluasi:**

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan e-procurement, termasuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi.

- **Penegakan Hukum:**

Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran kebijakan e-procurement, baik bagi aparat pemerintah maupun penyedia.

- **Peningkatan Transparansi:**

Meningkatkan transparansi dalam seluruh proses pengadaan, termasuk pengumuman informasi pengadaan secara terbuka dan mudah diakses.

### 4. Program Peningkatan Partisipasi:

- **Penyediaan Informasi:**

Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai paket pengadaan yang ditawarkan melalui e-procurement.

- **Fasilitasi Akses:**

Memfasilitasi akses penyedia, terutama UKM, untuk dapat berpartisipasi dalam proses e-procurement.

- **Pemberian Insentif:**

Memberikan insentif bagi penyedia yang aktif berpartisipasi dalam e-procurement, seperti kemudahan akses informasi, proses pembayaran yang lebih cepat, atau keringanan persyaratan.

### 5. Integrasi Sistem:

- **Integrasi dengan Sistem Lain:**

Mengintegrasikan sistem e-procurement dengan sistem lain yang terkait, seperti sistem perencanaan anggaran, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi manajemen aset.

- **Pemanfaatan Data:**

Memanfaatkan data yang terkumpul dari sistem e-procurement untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

**Gambar 1.**  
**Kegiatan Pendampingan mengenai paket pengadaan yang ditawarkan**  
**melalui E-Procurement**



*Sumber : Bagian PBJ Kab. Padang Pariaman*

**f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement” dibutuhkan anggaran Rp. 34.840.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 31.870.000 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 91,48 %. Realisasi kinerja sasaran strategis merncapai 100% dan dikategorikan Berhasil.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target .

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatkan pemanfaatan e- procurement	Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa yand ditindaklanjuti	100	91,48	8,52 %

Efisiensi Capaian Kinerja =  $100\% - 100\% = 0\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran =  $100\% - 91,48\% = 8,52\%$

Total Efisiensi =  $0 + 8,52\% = 8,52\%$

<p><b>Sasaran 5 :</b></p> <p><b>Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik</b></p>
--

### **Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang Bernilai Baik.**

Salah satu metode untuk mengetahui sejauh mana kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Melalui survei ini, pengguna layanan dapat memberikan penilaian yang berharga mengenai kinerja pelayanan publik, mengukur kepuasan mereka secara kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menjadi alat evaluasi bagi penyelenggara layanan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memastikan bahwa harapan dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara terpenuhi. Dengan langkah ini, diharapkan pelayanan publik dapat semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai yang dimanakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam pelayanan publik merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Indikator Kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Unit Kerja Pelayanan Publik yang bernilai baik.

a) **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

**Tabel 3.12**  
**Capaian Persentase UKPP Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase UKPP yang bernilai baik	%	100%	94%	94	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase Unit Kerja Pelayanan Publik yang bernilai baik tahun 2024 yaitu 94% dari target yang ditetapkan adalah 100% dengan kategori **“Berhasil”**, Artinya secara umum Unit Kerja Penyelenggara Pekayanan dari total 71 (tujuh puluh satu) sampel UKPP yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, diperoleh 68 (enam puluh delapan) UKPP yang bernilai baik dan 3 (tiga) UKPP yang bernilai “C” (kurang baik) sehingga secara rata-rata Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat UKPP diperoleh sekitar 84, 88 yaitu bernilai **“B” (Baik)**.

b) **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Daerah pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Target dan Capaian SKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase UKPP yang bernilai baik	%	N/A	92,3%	100	100%	94%	94	Berhasil

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa capaian kinerja UKPP yang bernilai baik di lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2023 dan tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan interpretasi baik. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berkeinginan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala sektor sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**c) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang bernilai baik tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

- 1) Komitmen Pimpinan setiap Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pelayanan.
- 2) Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Bagian Organisasi beserta Tim pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan selaku pembina, pengevaluasi dan pemantau penyelenggara pelayanan dengan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKPP) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3) Menjadikan hasil rekomendasi dan evaluasi dari pengguna pelayanan sebagai salah satu patokan dan memperbaiki kualitas pelayanan.
- 4) Respon yang maksimal dari UKPP yang di evaluasi/yang dibina dalam mempersiapkan dokumen maupun sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.

Disamping faktor-faktor pendukung diatas, terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam upaya pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Keterbatasan anggaran untuk perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang layak sesuai dibutuhkan penunjang penyelenggaraan pelayanan;
- 2) Keterbatasan SDM seperti kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan dan SDM yang kurang terampil menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- 3) Informasi pelayanan yang kurang jelas dikarenakan masih ada UKPP yang belum memiliki Standar Pelayanan sehingga terkadang menjadikan pengguna layanan terkendala dengan prosedur berbelit belit.

**d) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja**

- 1) Melakukan pengembangan terhadap sistem pengelolaan pengaduan untuk setiap Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan agar lebih transparan dan responsif;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM penyelenggara pelayanan salah satunya dengan mengikuti Bimtek dan atau Kapasiti building;

3) Melakukan dan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat menunjang kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat memberikan akses terbaik terhadap pengguna pelayanan.

**e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Untuk mencapai Indikator kinerja persentase UKPP yang bernilai baik tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut salahsatunya:

- Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Anggaran Rp. 50.000.000 dan realisasi anggarannya Rp. 49.600.000 atau dengan persentase 99,2%. Hasil dari SKM ini menjadi salah satu patokan atau standar perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tertuang sebagai janji perbaikan pelayanan pada UKPP.
- Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana. Pada Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 di anggarkan sebesar Rp. 21.599.600 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 19.948.000 atau dengan persentase 92,35%. Anggaran digunakan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik ke Unit Kerja Pelayanan.

**Gambar 1**  
**Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**



*Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024*

**Gambar 2**  
**Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**



**Gambar 3**  
**Money dan Pembinaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**



**Gambar 4**  
**Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**



## f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik” dengan indikator sasaran strategis “Persentase UKPP yang bernilai baik” dibutuhkan anggaran Rp. 80.512.400,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 79.306.500 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,50 %. dan Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 94%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP yang bernilai baik	94%	85,91	- 4,50 %

Efisiensi Capaian Kinerja =  $94\% - 100\% = -6\%$

Efisiensi Penyerapan Anggaran =  $100\% - 98,50\% = 1,50\%$

Total Efisiensi =  $-6\% + 1,50\% = -4,50\%$

<b>Sasaran 6 :</b> <b>Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b>
--

## Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti

### 1. Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan

transparan”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk menilai kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, dilakukan evaluasi SAKIP guna memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan solusi atas masalah yang ditemukan. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pemerintah daerah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahun dalam bentuk Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai hasil evaluasi SAKIP dan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan SAKIP Pemerintah Daerah Kedepan.

Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah keseluruhan dikali 100%.

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator kinerja Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti:

**a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

**Tabel 3.13**  
**Capaian Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tahun 2024 yaitu 100% dari target yang ditetapkan adalah 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, Artinya keseluruhan dari total 10 (sepuluh) rekomendasi pada LHE SAKIP pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 telah ditindaklanjuti sepanjang tahun 2024 melalui rencana aksi tindaklanjut atas hasil LHE SAKIP Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

**b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Target dan Capaian LHE Sakip**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100	100%	100%	100	Berhasil

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tahun 2023 dan tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan 100% dengan interpretasi sangat berhasil. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menindaklanjuti semua saran-saran dan rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP kedepan.

**c) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

- 1) Komitmen pimpinan, baik pimpinan daerah maupun pimpinan OPD, dalam menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP;
- 2) Sinergitas yang baik oleh Tim Kerja SAKIP Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki fungsi untuk memantau dan mendampingi OPD dalam merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target indikator dalam SAKIP. Selain itu, tim kerja ini melakukan pendekatan dan pendampingan kepada OPD yang belum dapat melakukan perbaikan;
- 3) Konsolidasi menyeluruh kepada seluruh OPD untuk meningkatkan serta melakukan perbaikan terhadap implementasi SAKIP termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja;
- 4) Dukungan dari semua pihak, mulai dari pimpinan OPD sampai ke level staf untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan sinkronisasi dokumen perencanaan hingga ke laporan kinerja.
- 5) Rutin melakukan rapat koordinasi Tim SAKIP Kabupaten untuk memastikan capaian kinerja dengan tujuan kinerja berdasarkan selaras rencana kerja yang telah disusun

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk agenda penyelesaian kinerja.

Disamping faktor-faktor pendukung diatas, terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam upaya pencapaian kinerja antara lain :

- 4) Kurangnya SDM yang memadai sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindaklanjut atas LHE SAKIP Pemerintah Daerah kurang maksimal;
- 5) Lambatnya response OPD dalam membrikan data-data yang diperlukan dalam upaya pemenuhan *evidence* atas rencana aksi tindak lanjut LHE SAKIP Pemerintah Daerah.

#### **d) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja**

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah;
- 2) Melakukan pembahasan berkala dengan Tim SAKIP Kabupaten terkait tindaklanjut LHE SAKIP Pemerintah Daerah;
- 3) Melakukan penyusunan SK Tim Kerja SAKIP Pemerintah Daerah.

#### **e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Untuk mencapai indikator kinerja “Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti”, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Program/Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan indikator tersebut, yaitu:

- Kegiatan Penataan Organisasi, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 58.328.000,00 dan dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 54.909.705,00 persentase capaian sebesar 94,14%. Sub Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan implementasi SAKIP sebagai berikut :
  - ✓ Rapat-rapat pembahasan LHE SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023
  - ✓ Pemetaan rencana aksi tindak lanjut atas LHE SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023 termasuk penetapan target penyelesaian dan penanggung jawab
  - ✓ Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
  - ✓ Koordinasi terkait perbaikan dokumen perencanaan seluruh OPD
  - ✓ Koordinasi terkait perbaikan dokumen pelaporan kinerja seluruh OPD

**Gambar 1.**

**Rapat Perumusan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHE SAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Tanggal 17 Januari 2024 dipimpin langsung oleh Bapak Sekda**



*Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah*

#### **f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk kegiatan penunjang indikator kinerja adalah Rp 54.909.705,00 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 58.328.000,00. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 5.86% . Persentase efiseinsi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat di asumsikam bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber baya biaya. Namun bila dilihat pada hasil yang diperoleh, anggaran tersebut sudah sangat efisien.

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” dengan Indikator “Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti” dibutuhkan anggaran Rp. 58.328.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 54.909.705,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94,13 % . dan Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	94,13	5,87%

Efisiensi Capaian Kinerja = 100 % - 100 % = 0 %

Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100% - 94,13% = 5,87%

Total Efisiensi = 0% + 5,87 % = 5,87 %

**B. Realisasi Anggaran Tahun 2023**

**Tabel 23.**

**REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2023**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5	
NAMA SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
SEKRETARIAT DAERAH			43.718.906.282		40.739.135.924		93,18%
<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA</u>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	33.524.715.695	BB	31.786.636.592	80%	94,81%
	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%		100%			
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB		BB			
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%		100%			
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	190.927.577	100%	166.688.209	100%	87,30%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	134.427.477	1 Dokumen	125.532.375	100%	93,38%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok laporan capaian kinerja yang di susun (Lakip Setda dan LPPD Setda)	2 Dokumen	56.500.100	2 Dokumen	41.155.834	100%	72,84%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	21.287.271.285	100%	20.464.674.972	100%	96,14%



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN dan tunjangan daerah lingkup Setda yang dibayarkan	1 Perangkat Daerah	20.819.730.285	1 Perangkat Daerah	20.047.979.044	100%	96,29%
	Jumlah gaji ASN dan tunjangan daerah lingkup Kecamatan yang dibayarkan	17 Kecamatan		17 Kecamatan		100%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yg dibayarkan honorrarium jasa adm keuangan	53 ASN	386.040.000	53 ASN	342.860.000	100%	88,81%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase verifikasi pertanggung jawaban & Perbendaharaan	100%	41.501.000	100%	36.849.700	100%	88,79%
	Jumlah Adm gaji ASN yang dibayarkan	305 ASN		230 ASN		76%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dok laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	36.986.228	50%	92,47%
<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	1.616.035.400	<b>100%</b>	1.221.933.402	<b>100%</b>	<b>75,61%</b>
	<b>Persentase Terpenuhi Peningkatan Pemahaman Hukum Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>		<b>90%</b>		<b>100%</b>	
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65 Paket	0	0 Paket	0	0%	0%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah administrasi staf ahli yang terfasilitasi dengan baik	3 Staf Ahli	1.543.825.400	3 Staf Ahli	1.160.486.996	100%	75,17%
	Jumlah administrasi Kepegawaian ASN dan Sawakelola dengan baik	12 Bulan		12 Bulan		100%	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	4 Kali	6.160.000	0 Kali	6.093.720	0%	98,92%
	Jumlah peserta Bimtek penyusunan peraturan perundang-undangan	50 Peserta		0 Peserta		0%	
	Jumlah sosialisasi produk hukum yang dilaksanakan	4 Kali		0 Kali		0%	
	Jumlah Nagari dan Kelompok Sadar Hukum	4 Nagari dan 4 Kelompok Sadar Hukum		-		0%	
	Jumlah sekolah sadar hukum	7 Sekolah		-		0%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yg mengikuti Bimtek Perundang-undangan	30 ASN	66.050.000	5 ASN	55.352.686	17%	83,80%
	Jumlah peserta bimtek perencanaan/keuangan lingkup setda	60 Peserta		0 ASN		0%	
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.761.708.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.682.503.143</b>	<b>100%</b>	<b>95,50%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik gedung dan kantor	12 Bulan	74.428.500	12 Bulan	74.229.585	100%	99,73%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan mebeleur	0 Paket	144.420.000	2 Paket	119.103.000	100%	82,47%
	Jumlah pengadaan peralatan kerja	2 Paket		4 Paket		200%	
	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Paket		3 Paket		150%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan Rumah Tangga Yang Disediakan	2 Paket	149.994.500	3 Paket	124.635.280	150%	83,09%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perlengkapan pemenuhan protokol kesehatan di lingkup setda	12 Bulan	25.050.000	12 Bulan	24.975.000	100%	99,70%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan baik	12 Bulan	118.575.000	12 Bulan	115.389.000	100%	97,31%
	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional yang terselenggara dengan baik dan lancar	6 hari Besar		6 Hari Besar		100%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	12 Bulan	620.650.000	12 Bulan	617.565.514	100%	99,50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pembayaran perjalanan dinas untuk Staf Ahli, Asisten dan Bagian Renkeu Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	628.590.000	12 Bulan	606.605.764	100%	96,50%



<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	361.200.000	<b>100%</b>	231.266.280	<b>100%</b>	<b>64,03%</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Paket	245.200.000	3 Paket	184.740.630	150%	75,34%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Paket	116.000.000	2 Paket	46.525.650	100%	40,11%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terlaksananya pemeliharaan dan perawatan taman kantor bupati dengan baik	12 Bulan	0	12 Bulan	0	100%	0
	Jumlah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan baik	12 Bulan		12 Bulan		100%	
<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.921.850.940</b>	<b>100%</b>	<b>3.817.403.334</b>	<b>100%</b>	<b>97,33%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola dengan baik	12 Bulan	55.096.300	12 Bulan	49.820.930	100%	90,42%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	795.300.000	12 Bulan	768.807.014	100%	96,66%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung acara Pemkab. Padang Pariaman	12 Bulan	402.585.000	12 Bulan	361.375.390	100%	89,76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan-bahan penunjang kebersihan gedung kantor	12 Bulan	2.668.869.640	12 Bulan	2.637.400.000	100%	98,82%
	Jumlah gaji tenaga swakelola lingkup setda yang dibayarkan	116 Swakelola		125 Swakelola		108%	
	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Disewa	10 Kendaraan		-		0%	
<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	739.570.000	<b>100%</b>	648.983.786	<b>100%</b>	<b>87,75%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perawatan kendaraan dinas lingkup setda	35 Kendaraan	387.070.000	35 Kendaraan	386.371.880	100%	99,81%
	Jumlah pembayaran bbm untuk KDH, WKDH, Sekda dan tamu daerah yang terfasilitasi	12 Bulan		12 Bulan		100%	
	Jumlah pembayaran bbm untuk staf ahli dan asisten	12 Bulan		12 Bulan		100%	
	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas lingkup setda	35 Kendaraan		0 Kendaraan		0%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Mebel	49.500.000	5 Mebel	35.020.500	50%	70,74%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	58.100.000	12 Bulan	13.985.000	100%	24,07%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	244.900.000	1 Gedung	213.606.406	100%	87,22%
<b>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>Persentase Terpenuhinya medical Check Up KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>	842.155.993	<b>0%</b>	810.054.496	<b>0%</b>	<b>96,18%</b>
	<b>Persentase Terpenuhinya Pakaian Dinas KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>0%</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji KDH/WKDH	12 Bulan	774.655.993	12 Bulan	765.432.496	100%	98,80%
	Jumlah Pembayaran Operasional KDH/WKDH	12 Bulan		12 Bulan		100%	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah medical check up yang dilakukan Bupati/Wakil Bupati	2 Paket	15.000.000	0 Paket	-	0%	0%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	1 Paket	52.500.000	1 Paket	44.622.000	100%	84,99%
<b>FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>	1.927.378.800	<b>100%</b>	1.885.713.545	<b>100%</b>	<b>97,83%</b>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga KDH yang terfasilitasi	12 Bulan	1.226.510.000	12 Bulan	1.192.964.431	100%	97,26%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga WKDH yang terfasilitasi	12 Bulan	700.868.800	12 Bulan	692.749.114	100%	98,84%
<b>PENATAUSAHAAN ORGANISASI</b>	<b>Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya</b>	<b>60%</b>	330.000.000	<b>58%</b>	315.456.443	<b>97%</b>	<b>95,59%</b>
	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>83,45</b>		<b>85,12</b>		<b>102%</b>	
	<b>Persentase perangkat daerah dengan nilai sakiP A ke atas</b>	<b>50%</b>		<b>27%</b>		<b>54%</b>	
	<b>Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan</b>	<b>12</b>		<b>10,81</b>		<b>90%</b>	



Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen data informasi jabatan yang tersedia per perangkat daerah	1 Dokumen	82.772.000	1 Dokumen	80.086.629	0%	96,75%
	Jumlah dokumen pembentukan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunan	1 Dokumen		0 Dokumen		0%	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi Yang Dikirim Pada Kompetisi Pelayanan Prima	5 Inovasi	80.512.400	0 Inovasi	78.106.500	100%	97,01%
	Jumlah OPD Yang Dibina Dalam Penerapan Standar Pelayanan Prima	8 OPD		11 OPD		137%	
	Jumlah Terfasilitasinya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap UKPP	8 UKPP		15 UKPP		187%	
	Jumlah tersusunnya Dokumen Peta Proses Bisnis Kabupaten	1 Dokumen		0 Dokumen		0%	
	Jumlah OPD Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	26 OPD		15 OPD		58%	
	Jumlah OPD Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	26 OPD		15 OPD		58%	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dibina	44 OPD & Kecamatan	86.788.000	44 OPD & Kecamatan	84.445.609	100%	97,30%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	21.599.600	0 Dokumen	19.948.000	0%	92,35%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP Kabupaten Padang Pariaman yang tersusun	1 Dokumen	58.328.000	1 Dokumen	52.869.705	100%	90,64%
<b>PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>	<b>Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran</b>	<b>85%</b>	546.617.700	<b>85%</b>	541.958.982	<b>100%</b>	<b>99,14%</b>
	<b>Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumentasi dengan baik</b>	<b>85%</b>		<b>85%</b>		<b>100%</b>	
Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah peserta yang mengikuti workshop keprotokoleran	70 Peserta	306.678.500	0 Peserta	304.231.142	0%	99,20%
	Jumlah terlaksananya pembuatan naskah pidato pemerintah daerah	12 Bulan		12 Bulan		100%	
	Jumlah acara Pemda yang terlaksana dengan keprotokoleran	12 Bulan		12 Bulan		100%	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah desiminasi informasi melalui baliho spanduk dan kalender	12 Bulan	124.889.200	12 Bulan	123.791.240	100%	99,12%
	Jumlah kerjasama dengan media cetak	25 Kerjasama		0 Kerjasama		0%	
	Jumlah majalah internal pemerintah kabupaten yang dipublikasikan	0		0 Edisi		-	
	Jumlah media Informasi yang dipublikasikan dan di dokumentasikan melalui pariwisata, iklan, advertorial, media cetak,online dan elektronik	0		0 Media		-	
	Jumlah pengaduan masyarakat melalui pesan singkat penduduk (PESDUK) melalui SMS gateway	0		0 Pengaduan		-	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah klipng berita Pemkab Padang Pariaman secara digital dan manual	100 Bundel Kliping	115.050.000	0 Kliping Digital	113.936.600	-	99,03%
	Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman	12 Bulan		12 Bulan		100%	
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat</b>	<b>100%</b>	8.255.767.450	<b>100%</b>	7.746.528.604	<b>100%</b>	<b>93,83%</b>
	<b>Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah</b>	<b>75%</b>		<b>72%</b>		<b>96%</b>	
	<b>Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri</b>	<b>2,800 (tinggi)</b>		<b>2,51</b>		<b>90%</b>	
<b>ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi</b>	<b>30%</b>	<b>157.000.000</b>	<b>35%</b>	<b>153.743.663</b>	<b>117%</b>	<b>97,92%</b>
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah camat yang berprestasi	0 Camat	17.000.000	3 Camat	16.551.000	300%	97,35%



	Peringkat camat Padang Pariaman berprestasi di tingkat Provinsi	Peringkat 5		Peringkat 10		50%	
	Jumlah fasilitasi Kepala Daerah dalam mengikuti Rakor di Provinsi	0 Kali		0 Kali		0%	
	Jumlah terselenggara rapat kerja camat	2 kali		1 Kali		50%	
	Jumlah terselenggara rapat koordinasi pemerintahan	1 kali		0 Kali		0%	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen data kependudukan	0 Dokumen	45.000.000	0 Dokumen	44.207.373	0%	98,23%
	Jumlah data Rupabumi unsur buatan yang terdata	8 Kecamatan		0 Kecamatan		0%	
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Ketertarikan dan Ketertiban yang dilaksanakan	8 Kecamatan		0 Kecamatan		0%	
	Jumlah terlaksana fasilitasi batas daerah	1 Segmen		1 Segmen		100%	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Buku LPPD kabupaten padang pariaman yang tersusun	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	92.985.290	100%	97,87%
	Jumlah buku LKPJ Bupati Padang Pariaman yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		100%	
	Jumlah dookumen koordinasi penerapan standar pelayanan minimal	1 Dokumen		1 Dokumen		100%	
	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Otonomi Daerah dengan DPRD	8 Kali		6 Kali		75%	
<b>PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi</b>	<b>Peringkat 3</b>	7.641.920.850	<b>Peringkat 5</b>	7.140.238.955	<b>60%</b>	<b>93,43%</b>
	<b>Persentase akumulasi mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemdab Kab.Padang Pariaman</b>	<b>60%</b>		<b>60%</b>		<b>100%</b>	
	<b>Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Kab. Padang Pariaman</b>	<b>10%</b>		<b>10%</b>		<b>100%</b>	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan hari besar islam yang terfasilitasi	5 Hari Besar	7.581.092.850	5 Hari Besar	7.109.460.255	100%	93,77%
	Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 Kegiatan MTQ		1 Kegiatan MTQ		100%	
	Jumlah kegiatan MUI yang terfasilitasi	1 Kegiatan		0 Kegiatan		0%	
	Jumlah kegiatann LPTQ yang terfasilitasi	2 Kegiatan		2 Kegiatan		100%	
	Jumlah pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang difasilitasi	350 Jamaah Haji		279 Jamaah Haji		80%	
	Jumlah terlaksananya operasional Masjid Agung Kab. Padang Pariaman	12 Bulan		12 Bulan		100%	
	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	2 Lembaga		0 lembaga		0%	
	Jumlah rumah tahfiz yang terbentuk	5 Rumah Tahfiz		5 Rumah Tahfiz		100%	
	Jumlah pembinaan majelis Taklim Tingkat Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman	17 Kecamatan		0 Kecamatan		0%	
	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap guru TPA/TPSA	2 Kali		0 Kali		0%	
	Jumlah Hafiz/Hafizah di Kabupaten Padang Pariaman	1300 Hafiz/Hafizah		1400 Hafiz/Hafizah		108%	
	Jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan baca tulis Al-Quran	17 Kecamatan		17 Kecamatan		100%	



	Jumlah terlaksananya monitoring pesantren Ramadhan dan penyaluran bantuan safari ramadhan	17 Kecamatan		17 Kecamatan		100%	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta rapat koordinasi kesejahteraan sosial melalui pemenuhan hak anak	70 Peserta	60.000.000	0 Peserta	29.966.100	0%	49,94%
	Jumlah kegiatan kegiatan kesejahteraan sosial	1 Kegiatan		0 Kegiatan		0%	
	Jumlah terbinanya program UKS di 4 tingkatan jenjang pendidikan masing-masing kecamatan dan sekretariat TP UKS Kecamatan	68 Sekolah		0 Sekolah		0%	
	Jumlah terpilihnya sekolah sehat (Sekolah Pelaksana) UKS yang mewakili Kabupaten di tingkat propinsi dan tingkat nasional	4 Sekolah		0 Sekolah		0%	
	Jumlah rakor kenakalan remaja dan bahaya narkoba	1 Kegiatan		0 Kegiatan		0%	
	Jumlah terpilihnya sekolah yang berwawasan ber PHBS sesuai dengan 8 indikator PHBS di sekolah	4 Sekolah		0 Sekolah		0%	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah terlaksananya koordinasi dan pendampingan program kerja Bagian Kesra	12 Bulan	828.000	12 Bulan	812.600	100%	98,14%
	Jumlah rakor bidang pemuda dan olahraga	1 Kali		0 Kali		0%	
	Jumlah rakor bidang kepariwisataan	1 Kali		0 Kali		0%	
<b>FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus</b>	<b>90%</b>	413.846.600	<b>90%</b>	410.437.120	<b>100%</b>	<b>99,17%</b>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah peraturan Bupati yang tersusun	40 Perbup	60.148.600	18 Perbup	60.032.455	45%	99,80%
	Jumlah peraturan daerah yang tersusun	5 Perda		7 Perda		140%	
	Jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasikan	5 Produk Hukum		32 Produk Hukum		700%	
	Jumlah Ranperda yang tersusun	5 Raperda		5 Raperda		100%	
	Jumlah surat keputusan bupati yang berhasil tersusun	410 SK		570 SK		139%	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah tim kuasa hukum Bupati yang lebih terampil dalam beracara di Pengadilan	3 Orang	298.688.000	3 Orang	295.834.642	100%	99,04%
	Jumlah penyelesaian kasus yang dihadapi Pemerintah Daerah baik di dalam Pengadilan maupun di Luar Pengadilan	7 Kasus		13 Kasus		186%	
	Jumlah terbantunya masyarakat miskin di Kab. Padang Pariaman dalam Penyelesaian Kasus Hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan	6 Kasus		0 Kasus		0%	
	Jumlah penghargaan Kabupaten peduli HAM	1 Penghargaan		1 Penghargaan		100%	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	210 Buku LD BD SJDIH	55.010.000	2 Buku LD BD SJDIH	54.570.023	100%	99,20%
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	30 Produk Hukum		23 Produk Hukum		77%	
	Jumlah Produk Hukum dalam Sistem JDIIH	5 Perda, 45 Perbup		5 Perda, 18 Perbup		100% dan 40%	
<b>FASILITASI KERJASAMA DAERAH</b>	<b>Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>	<b>85%</b>	43.000.000	<b>90%</b>	42.108.866	<b>106%</b>	<b>97,92%</b>
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah yang terjalin bersama	6 Kerjasama	43.000.000	22 Kerjasama	42.108.866	217%	97,92%
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<i>Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman</i>	<b>100%</b>	573.107.300	<b>50%</b>	546.460.899	<b>50%</b>	<b>95,35%</b>
	<i>Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu</i>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	



	<i>Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD</i>	12%		26,58%		221%	
	<i>Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu</i>	100%		100%		100%	
<b>PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN</b>	<b>Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian</b>	100%	120.365.600	100%	114.479.074	100%	95,10%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen pengawasan terhadap BPR dan PDAM	2 Dokumen	62.893.850	2 Dokumen	61.343.587	100%	97,53%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen laporan Pengawasan inflasi daerah	1 Dokumen	38.660.000	4 Dokumen	34.889.787	400%	90,24%
	Jumlah event Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Daerah yang diikuti	4 Event		7 Event		175%	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang serta jasa bersubsidi	17 Kecamatan	18.811.750	17 Kecamatan	18.245.700	100%	96,99%
<b>PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman</b>	100%	160.000.000	100%	153.861.689	100%	96,16%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah terlaksananya fasilitasi penyusunan program pembangunan perangkat daerah	3 Kali	60.000.000	3 Kali	57.885.093	100%	96,47%
	Jumlah meningkatnya kemampuan dan pengetahuan ASN dan Pengelola Kegiatan dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah	50 ASN		0 ASN		0%	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah terlaksananya pembinaan dan kelengkapan administrasi kontrak	120 Paket	50.000.000	160 Paket	48.999.500	133%	97,99%
	Jumlah pembinaan pengendalian administrasi pembangunan	60 ASN		0 ASN		0%	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kegiatan OPD/SKPD	27 OPD	50.000.000	27 OPD	46.977.096	100%	93,95%
	Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	120 Paket		160 Paket		133%	
<b>PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa</b>	97%	247.808.900	100%	234.886.836	103%	94,78%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen RUP yang disusun	27 OPD	160.425.600	27 OPD	155.492.879	100%	96,92%
	Jumlah paket pengadaan secara SPSE yang dikelola	170 Paket		48 Paket		28%	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang terinput	180 Paket	34.840.000	497 Paket	31.870.000	276%	91,47%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	60 Peserta	52.543.300	63 Peserta	47.523.957	105%	90,44%
<b>PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam</b>	100%	44.932.800	100%	43.233.300	100%	96,21%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah OPD yang terfasilitasi terkoordinasi, terkonsultasi terkait dibawah lingkup koordinasi di bagian pembangunan ekonomi, serta pemerintah tingkat propinsi dan pusat	6 OPD	23.560.800	6 OPD	22.991.000	100%	97,58%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah OPD yg termonitoring dan terkoordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mitra koordinasi bagian perekonomian	6 OPD	11.902.500	6 OPD	11.270.800	100%	94,69%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah penyusunan Ranperda tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau CSR (Corporate Social Responsibility)	1 Dokumen	9.469.500	0 Dokumen	8.971.500	0%	94,74%

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

#### B. Rencana Perbaikan

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat capaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi target kinerja, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu sebagai upaya perbaikan kedepan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan Upaya akselerasi untuk pencapaian tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 4 (empat) tujuan dan 6 (Enam) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat disimpulkan bahwa Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat disimpulkan bahwa 1 indikator “masih dalam tahap penilaian”. 5 indikator “berhasil”.

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terus menjaga semangat untuk berinovasi terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik kepada Masyarakat.
2. Melaksanakan program-program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian sasaran strategis daerah.
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang terintegrasi (SIMAK Kinerja) yang selaras dengan target-target daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan di manfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Demikianlah beberapa hal yang dapat diinformasikan dalam LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2024 ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati atas Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik antara bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah mempermudah pemberian data-data yang dibutuhkan dan koordinasi yang maksimal. Adapun saran, masukan dan tanggapan yang membangun sangat diharapkan demi sempurnanya sebuah LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2024 ini.

Parit Malintang, 05 Februari 2025



**SEKRETARIS DAERAH**

**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM.C.R.B.C**

**Pembina Utama Madya NIP. 19790402 199803 1 003**

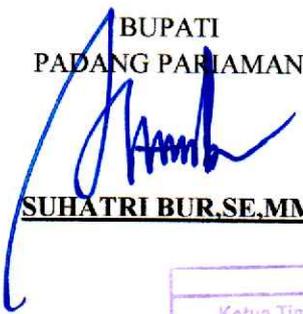
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%
4	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100%
		2. Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	5 Lembaga
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60 (cukup)
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%
6	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement	Persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	14%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.984.999.900	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	711.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.805.223.217	
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.501.223.117</b>	

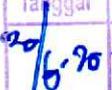
Parit Malintang, 02 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI  
PADANG PARIAMAN

  
**SUHATRI BUR, SE, MM**

  
**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C**

NIP. 1979040219831003

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wakil	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
20/1/20		20/1/20	A	20/1/20	

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapinbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	